

**KASUS ARTIKEL AFTER MARCOS, NOW SOEHARTO BILLIONS DALAM HUBUNGAN  
BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA  
TAHUN 1986-1989**

**M. Handoko**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: vanndoki@yahoo.co.id

**Sumarno**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

Hubungan bilateral Indonesia-Australia telah berjalan selama beberapa dekade dan sangat unik. Tiada hubungan kedua negara yang begitu mesra sebagaimana hubungan Indonesia-Australia, namun juga tidak pernah ada hubungan negara yang begitu rentan dengan konflik dan berbagai gosip sebagaimana yang menimpa hubungan Indonesia-Australia. Hal itu karena komponen yang menjadi pelengkap dalam hubungan kedua negara cukup berbeda seperti kondisi masyarakatnya, para pelaku politiknya dan secara khusus peran media massa yang menjadi media informasi menganut sistem yang berbeda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut terlihat semakin jelas ketika terjadi kasus David Jenkins yang melibatkan kebebasan pers. Jenkins menulis artikel opini di surat kabar Sydney Morning Herald dengan judul After Marcos, Now Soeharto Billions pada 10 April 1986. Tidak lama setelah munculnya artikel After Marcos, Now Soeharto Billions hubungan Indonesia-Australia berada pada titik puncak kemunduran. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kedua negara untuk memulihkan kondisi retaknya hubungan bilateral yang diakibatkan oleh artikel After Marcos, Now Soeharto Billions. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik intern, interpretasi, serta historiografi dengan merujuk sumber utama yaitu, surat kabar sezaman tentang kasus artikel After Marcos, Now Soeharto Billions, serta dari bahan-bahan pustaka dan referensi lain yang relevan. perbedaan kondisi sistem pers yang dianut kedua negara turut mempengaruhi munculnya artikel After Marcos Now Soeharto Billions. Kebebasan pers yang dianut Australia memberikan peluang kepada individu untuk membuat berita-berita yang menguntungkan pihak-pihak tertentu meskipun ada pihak-pihak lain yang dirugikan. Dampak yang ditimbulkannya pun sangat luas seperti pembatalan kunjungan diplomatik, penolakan wartawan dan wisatawan asal Australia hingga pembekuan pembicaraan perjanjian Celah Timor. Ternyata hanya dengan kearifan kedua negara retaknya hubungan bilateral kedua negara dapat dipulihkan kembali tanpa ada harus yang dirugikan. Pemulihan hubungan bilateral kedua negara hanya dapat ditempuh melalui meningkatkan pemahaman pentingnya sebuah persahabatan antar kedua negara.

**Kata Kunci :** Artikel, Sistem Pers dan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia

**Abstract**

*Indonesia - Australia bilateral relations have been running for decades and is very unique . There is no relationship between the two countries is so intimate as the relationship between Indonesia and Australia , but also is not and never was a country so prone to conflict and various gossip like what befell Australia-Indonesia relations. That's because a complementary component in the relations between the two countries is quite different as the condition of society, political actors, and in particular the role of the mass media to the media of information adheres to different systems. Jenkins wrote a opinion article in the Sydney Morning Herald under the title After Marcos, Now Suharto Billions on 10 April 1986. Not long after the article After Marcos, Now Soeharto Billions Indonesia - Australia relations are at the cusp of a setback. Various attempts have been made by both countries to restore bilateral relations breakdown condition caused by the article After Marcos, Now Soeharto Billions. This study uses historical methods include heuristic, internal criticism, interpretation, and historiography to refer to the primary sources, contemporary newspaper articles about the case After Marcos, Now Soeharto Billions, as well as of library materials and other relevant references. Its impact is wide like the cancellation of diplomatic visits, denial of journalists and tourists from Australia to the freezing of the Timor Gap treaty talks. It turns out only with wisdom rift between the two countries bilateral relations can be restored without any need aggrieved. Restoration of bilateral relations can only be reached through increased understanding of the importance of a friendship between the two countries.*

**Keywords:** Article, Pers System, Indonesia-Australia Bilateral Relations

## Pendahuluan

Hubungan Australia dengan Indonesia telah terjalin sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan pasca proklamasi 17 Agustus 1945 rakyat Australia yang mayoritas berkulit putih memberikan dukungan nyata dengan cara memboikot suplai obat-obatan dan makanan terhadap kapal-kapal Belanda yang membawa persenjataan yang akan berlabuh dipelabuhan Australia. Kondisi itu terjadi karena adanya persamaan persepsi dalam pemerintahan Australia yang saat itu dikendalikan oleh partai buruh yang ideologinya sejalan dengan perjuangan negara-negara berkembang atau yang baru merdeka. Meskipun mengundang perdebatan dalam negeri namun secara *de facto* Australia memberikan pengakuan atas kemerdekaan RI pada tahun 1947 pasca perjanjian Linggarjati.

Hubungan itu terjalin dengan baik, tetapi tidak berlangsung lama, konflik pun terjadi ketika Indonesia menuntut atas wilayah Irian Jaya (Irian Barat) dari kekuasaan Belanda sesuai perjanjian Renville dan KMB. Dalam hal ini pemerintah Australia berada di pihak Belanda dalam sengketa yang diperdebatkan di PBB. Kondisi yang demikian dapatlah dipahami karena sejak 10 Desember 1949 telah terjadi pergantian kekuasaan pemerintahan di Australia dari Partai Buruh ke Partai koalisi (Partai Liberal-Partai Country) di bawah pemerintahan Perdana Menteri R.G. Menzies.<sup>1</sup>

Pasang surutnya hubungan Indonesia-Australia rupanya sudah menjadi bagian yang tidak terhindarkan, kehangatan hubungan pada awal Orde Baru tidak bisa bertahan ketika Indonesia mengadakan invasi ke Timor Timur tahun 1975.

Terdapat lima orang korban wartawan Australia akibat invasi tersebut dan Indonesia tidak dapat mempertanggungjawabkannya karena koresponden tersebut masuk tidak menggunakan prosedur resmi melalui Jakarta. Kritik bermunculan dari masyarakat Australia yang menganggap persoalan tersebut menyangkut profesi para jurnalis, demikian juga dari para aktivis HAM selalu mempermasalahkan invasi tersebut. Permasalahan Timor Timur dapat diselesaikan

setelah Australia melalui Menlu Andrew Peacock pada tahun 1978 mengumumkan secara *de facto* penggabungan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia.

Tiada hubungan kedua negara yang begitu mesra sebagaimana hubungan Indonesia-Australia, namun juga tidak pernah ada hubungan kedua negara yang begitu rentan dengan konflik dan berbagai gosip sebagaimana yang menimpa hubungan kedua negara, Indonesia-Australia. Hal itu karena kedua negara memiliki sejarah dan tradisi serta budaya politik yang berbeda.

Hubungan Indonesia-Australia dipengaruhi oleh isu-isu yang banyak melibatkan citra kedua negara sehingga tidak dapat dihindarkan terbentuknya persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan.<sup>2</sup> Terbentuknya persepsi yang keliru tersebut menunjukkan adanya pola-pola hubungan yang memberi warna dalam berperilaku politik bagi kedua negara. Hal itu dikarenakan komponen yang menjadi pelengkap dalam hubungan kedua negara cukup berbeda seperti kondisi masyarakatnya, para pelaku politiknya dan secara khusus peran media massa yang menjadi media informasi menganut sistem nilai yang berbeda pula.

Perbedaan-perbedaan tersebut terlihat dengan jelas ketika terjadi kasus David Jenkins yang melibatkan kebebasan pers. Artikel opini yang ditulis David Jenkins dalam surat kabar harian *Sydney Morning Herald* edisi 10 April (After Marcos Now Soeharto Billion's) yang berisi tentang sepak terjang bisnis keluarga Soeharto.

Berbagai protes pun sempat dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk kekecewaannya atas pemuatan artikel yang ditulis oleh David Jenkins. Pembatalan kunjungan diplomatik B.J. Habibie, Menghentikan hubungan kerja sama militer dengan Australia dan penghentian sementara pembicaraan mengenai Celah Timor (Timor Gap) hanyalah beberapa dari sekian banyak dampak yang ditimbulkan oleh kasus artikel *After Marcos, Now Soeharto Billions*.

Kedua negara, baik Indonesia maupun Australia telah melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan hubungan bilateral mereka, namun karena adanya perbedaan budaya dan masyarakat terutama sistem pers yang dianut, keduanya dihadapkan pada persoalan-persoalan diluar kendali politik yang rumit untuk dicari pemecahan bersama sebagai solusinya.

<sup>1</sup> Terdapat perbedaan yang sangat kontras mengenai sikap Pemerintahan Partai Buruh dengan Pemerintahan Liberal-Country terhadap Indonesia. Pemerintah Liberal-Country menempatkan konsep "kepentingan vital" Irian Barat bagi pertahanan Australia sebagai elemen yang sangat penting dalam kebijaksanaannya terhadap Indonesia.

<sup>2</sup> Hilman, Adil. 1993. *Hubungan Australia Dengan Indonesia 1945-1962*. Jakarta: Djambatan. hlm xi-xii

Penelitian ini dilakukan karena tidak menutup kemungkinan bahwa kasus serupa akan terulang kembali dengan format dan intensitas yang berbeda di masa depan. Peneliti tertarik untuk menggali informasi lebih banyak tentang Apa kondisi yang melatarbelakangi David Jenkins menulis artikel *After Marcos, Now Soeharto Billions* serta Bagaimana dampak/akibat artikel *After Marcos, Now Soeharto Billions* terhadap hubungan Bilateral Indonesia – Australia 1986-1989.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik intern, interpretasi, serta historiografi dengan merujuk sumber utama yaitu, berita dari surat kabar sezaman baik yang terbit di Indonesia dan juga Australia, serta dari bahan-bahan pustaka dan referensi lain yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Latar Belakang Munculnya Artikel *After Marcos Now Soeharto Billions*.

Pada awal penelitian ini telah sedikit dijelaskan jika perbedaan kebudayaan, masyarakat, sistem politik terutama sistem pers yang dianut oleh Indonesia dan Australia turut menjadi kondisi yang melatarbelakangi munculnya artikel *After Marcos Now, Soeharto Billions*. Sejauh manakah kondisi tersebut menjadi awal merenggangnya hubungan bilateral Indonesia-Australia pada 1986-1989 akan menjadi fokus pada bagian ini.

#### 1.1 Pers Liberal Sebagai Pers Australia

Teori pers liberal atau juga dikenal dengan teori pers bebas pertama kali muncul pada abad ke-17 yang merupakan reaksi atas kontrol penguasa terhadap pers. Teori pers liberal atau juga dikenal dengan teori pers bebas pertama kali muncul pada abad ke-17 yang merupakan reaksi atas kontrol penguasa terhadap pers.

Menurut konsep kebebasan pers liberal, pers memiliki kebebasan absolut. Pers bebas menulis apa saja yang menurutnya pantas untuk ditulis, kecuali fitnah pribadi dan hasutan melakukan desersi waktu perang. Rumusan teori ini tentang berita sangatlah sederhana: berita adalah apa saja yang menurut pandangan wartawan layak untuk disampaikan kepada pembaca. Sejauh mana kebenaran berita yang dimuat, itu masalah sekunder.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Phillip Kitley dkk. 1998. *Australia di Mata Indonesia, Kumpulan Artikel Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: Gramedia hlm 295

Pers liberal memiliki tugas untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Tugas pers dalam sistem politik liberal berperan ikut mendidik masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah supaya tindak-tanduknya tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Bagaimana media massa dapat menjadi alat penentu dalam membuat dan bahkan merubah suatu kebijakan dari sebuah negara yang berdaulat? Itulah sedikit gambaran media massa Australia, khususnya peranan pers dalam membentuk opini masyarakat Australia dan bahkan pemegang kendali politiknya. Hal itu tentunya hanya dapat dipahami dari latar belakang budaya dan politik negara yang bersangkutan.

Australia adalah negara yang awalnya dibuka sebagai pemukiman narapidana oleh Kerajaan Inggris. Proses migrasi narapidana Inggris ke Australia dimulai pada tahun 1788 dipimpin oleh Arthur Phillip yang nantinya menjadi Gubernur Jendral pertama koloni Australia.

Aspek yang paling bermakna dari imigran-imigran Inggris terutama selama permulaan masa migrasi adalah kesetiaan para imigran-imigran itu memelihara nilai-nilai dan sikap ke-Inggris-an di negeri yang begitu besar, begitu berbeda dengan Inggris, dan begitu jauh dari Inggris. Hal ini dimungkinkan karena dua faktor. Pertama, dari 163.000 narapidana yang ditransportasikan ke Australia, sebagian besar berdarah dan berasal dari Inggris. Kedua, kekuatan Inggris di lautan memungkinkan usahanya menutup Australia terhadap infiltrasi kekuatan Eropa lainnya, seperti Perancis dan Belanda.<sup>4</sup>

Australia merupakan suatu wadah bagi seratus kebudayaan lebih, yang datang dari berbagai negara di dunia. Hal ini dapat dipahami karena imigran-imigran yang diterima Australia datang dari berbagai negara sehingga kebudayaan Australia bersifat heterogen. Kebudayaan Australia yang sifatnya homogen tidak ada. Sifat heterogen kebudayaan-kebudayaan Australia ini terikat oleh persatuan bahwa Australia adalah sebuah bangsa.<sup>5</sup>

Australia tidak dapat mengandalkan kebudayaan sebagai alat pemersatu bangsanya. Hal ini dikarenakan, di Australia tidak ada suatu kebudayaan yang telah mengakar kuat. satu-satunya pemersatu bangsa Australia adalah proses politik yang mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat. Sistem demokrasi

<sup>4</sup> J. Siboro. 1989. *Sejarah Australia*. Jakarta: IKIP Bandung. hlm 138.

<sup>5</sup> Ratih Hardjono. 1992. *Suku Putihnya Asia, Perjalanan Australia Mencari Jati Dirinya*. Jakarta: Gramedia. hlm 215

liberal yang menjadi dasar bangsa Australia ini, yang dianut oleh mayoritas pemegang tampuk pemerintahan.

Hal itu telah diyakini oleh para politisi pemegang kendali pemerintah pada waktu itu. Hanya politik liberal satu-satunya alat yang dapat mengikat dan mempersatukan negeri Australia, sebab di Australia tidak ada adat istiadat dan budaya yang dianggap mewakili budaya Australia seperti halnya India. Australia juga tidak mempunyai perjuangan dalam memperoleh kemerdekaan yang mampu menjadi pengikat bangsa sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia. Kondisi politik tersebut tentunya berbeda dengan sistem politik yang berlaku di India atau di Indonesia.<sup>6</sup>

Kondisi seperti itu membuat Australia mempunyai kesadaran politik yang didasari oleh sifat-sifat egalitarian. Suatu pranata yang mengakui adanya kesamaan hak dan derajat setiap individu dalam aspek kehidupan termasuk dalam politiknya.

Rasa solidaritas antar sesama yang ditanam sejak kedatangan nenek moyang orang kulit putih di bumi Australia telah melahirkan jiwa untuk tidak saling mengkhianati. Tradisi itu tentunya telah melahirkan semangat mengecam kepada penguasa atau semua pihak yang sewenang-wenang setelah Australia menjadi negara yang merdeka, bebas kekangan Inggris. Jiwa mengecam itu telah menjadi semakin membudaya seiring dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat Australia yang merata yang diiringi pula dengan tindakan-tindakan mengecam terhadap negara lain melalui pers.

Australia memberikan kebebasan kepada media massanya seperti TV, Radio, dan Pers dalam mengolah dan menyiarkan berita. Kebebasan Pers yang diberikan justru seringkali menimbulkan permasalahan yang menyulitkan hubungan bilateral Australia dengan negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya dan secara khusus dengan Indonesia.

Kebebasan pers di Australia sangatlah luas. Tidak ada satu kekuatanpun yang mampu membatasi pers seperti menyensor atau melarang, termasuk pemerintah Australia sekalipun. Hal itu dikarenakan pers Australia menganut sistem pers liberal. Pers liberal menghendaki adanya pembagian kelompok politik yang memerintah dan oposisi.

Ekses nyata dari pers liberal Australia itu adalah suatu kebebasan yang dipakai untuk menghantam

pribadi atau golongan yang tidak disenangi. Dalam kancan politik, pers kemudian menjadi alat ampuh untuk menghantam pihak lawan. Tidak hanya itu saja, pers ada kalanya secara keji menyerang kepala negara-negara lainnya.<sup>7</sup>

## 1.2 Pers Indonesia

Berbeda dengan pers di Australia yang menganut pers liberal, maka pers yang berlaku di Indonesia adalah Pers Nasional, Pers Pancasila, Pers Perjuangan. Hal itu dapat dipahami karena latar belakang pers Indonesia yang tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sehingga keberadaan pers di Indonesia berakar dari tata nilai dan identitas bangsa Indonesia sendiri. Budaya politik yang dimiliki oleh kedua negara tersebut juga berbeda. Demikian pula sistem pers yang dianut oleh Australia dan Indonesia relatif berbeda bahkan cenderung bersebrangan. Hal itu bisa dipahami dan diminimalisir apabila dengan meningkatkan saling memahami perbedaan latar belakang dan budaya kedua bangsa.

Pers Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Pers No.21 tahun 1982 merupakan lembaga kemasyarakatan alat Perjuangan Nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 2 UU Pokok Pers ayat 3 tahun 1982, Pers Indonesia dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan mempunyai fungsi untuk:

- Menyebarluaskan informasi yang objektif.
- Menyalurkan aspirasi rakyat.
- Meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat.
- Melakukan kontrol sosial yang konstruktif.<sup>9</sup>

Fungsi pers yang telah dirumuskan tersebut tentunya tidak terlepas dari tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh media massa Pers Indonesia. Tugas dan kewajiban yang dibebankan ialah:

- Melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila
- Memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat berladaskan Demokrasi Pancasila.
- Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung jawab.

<sup>6</sup> Sumarno 1997. *Pers Australia Dan Pengaruhnya Dalam Hubungan Indonesia-Australia (Kasus Tulisan Wartawan David Jenkins 1986)*. Surabaya: Tanpa Penerbit. hlm 4

<sup>7</sup> Phillip Kitley dkk. *Op Cit.* hlm 297.

<sup>8</sup> J.C.T. Simorangkir. 1986. *Pers SIUPP dan Wartawan*. Jakarta: Gunung Agung. hlm 3

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 6

- Menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa.
- Memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.
- Mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional
- Memperjuangkan terwujudnya tata internasional baru di bidang informasi dan komunikasi.<sup>10</sup>

Salah satu hal yang patut diperhatikan berkaitan dengan pers Indonesia pada masa Orde Baru adalah berkembangnya slogan “pers yang sehat” yaitu kebebasan pers yang bertanggung jawab sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 5 UU Pokok pers: Pers bebas dan bertanggung jawab didasarkan oleh kesadaran akan perlunya keselarasan antara hak dan kewajiban hendaknya disebut dalam satu nafas, karena hak dan kewajiban erat kaitannya dengan tugas dan fungsi. Dibanding dengan Australia yang menganut sistem pers liberal dalam pengertian bebas dari campur tangan pihak lain termasuk pemerintah. Hal ini tentunya bertolak belakang.

Konsep kebebasan pers pada sistem pers tanggung jawab sosial berbeda dengan pers bebas (pers liberal). Kebebasan pers adalah norma kultural yang jadi acuan nilai bersama (*shared values*) di ruang publik sedangkan pers bebas adalah kondisi yang melandasi keberadaan institusi pers yang menjadi otonomi pers menjalankan fungsi sosialnya. Pers penganut sistem tanggung jawab sosial mengenal pertanggungjawaban etis yang harus di patuhi setiap media dan wartawan kepada khalayaknya termasuk pemerintah.<sup>11</sup>

Perbedaan pers Indonesia dan Australia yang berujung pada “ketidakakuran” antara kedua negara tersebut juga terlihat dari isi liputan persnya. Menurut Nunung Prajarto, terdapat lima poin penting untuk menjabarkan rasa ketidakpuasan dari kedua belah pihak terhadap liputan pers mereka sebagai berikut.<sup>12</sup>

*Pertama*, Australia dan Indonesia pada prinsipnya mengadopsi sistem pers yang sama, yaitu sistem pers tanggung jawab sosial. landasan untuk kebebasan pers Australia adalah kode etik Persatuan Wartawan Australia (AJA). Berbeda dengan Australia, sistem pers Indonesia tercermin dari esensi “pers yang sehat” yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab.

*Kedua*, meskipun mengadopsi sistem pers yang sama namun terdapat perbedaan dalam penerapannya

yang disebabkan oleh hal-hal berikut: pemaknaan yang disebabkan oleh hal-hal berikut: pemaknaan yang berbeda dalam term kebebasan dan term tanggung jawab; landasan sistem politik dan sistem sosial yang mewadahi sistem pers; serta variasi latar belakang budaya dan politik antara orang-orang Indonesia.

*Ketiga*, penerapan makna kebebasan dan tanggung jawab di Indonesia melahirkan sebuah perilaku pers yang terbatas dan justru kekurangberanian untuk bertanggung jawab Di Australia, hal yang sama justru melahirkan perilaku, meminjam istilah Hardjono, agresif dan tidak takut atau bahkan menyukai konflik, memandori pihak lain dan berlomba-lomba menjadi *hero*.<sup>13</sup>

*Keempat*, sistem pers yang sama dalam kenyataannya tidak berada dalam wadah sistem politik dan sistem sosial yang sama, yang ditunjukkan dengan posisi pers yang “melayang” di antara gaya bebas Barat dan kecenderungan otoritatif, sedang posisi pers Australia sebaring dengan sub-sistem kehidupan yang lain serta memainkan peranan yang esensial dalam wadahnya tersebut. Setidaknya seperti kondisi yang mau tidak mau membuat Pemerintah Australia menempatkan secara tinggi hak warga negara dan kelompok, termasuk media, untuk mengekspresikan dan mengkritik pendapat.

*Kelima*, perbedaan latar belakang politik dan budaya tersebut secara tidak langsung mempengaruhi gaya dan cara seseorang atau kelompok dalam mengekspresikan pendapat mereka, termasuk seperti yang dilakukan oleh pers dan pihak lain yang memanfaatkan aktivitas pers. Jika kultur Indonesia menempatkan penghormatan terhadap *the elder* dan *the leader*, Hardjono memperkirakan gaya Australia dipengaruhi oleh gaya Irlandia, tempat asal sebagian besar penduduk Australia, yang menggemari perdebatan.<sup>14</sup>

Perbedaan sistem pers Australia dan sistem pers Indonesia itulah yang akan digunakan sebagai pendekatan dalam melihat seberapa jauh tulisan David Jenkins dalam artikelnya di harian *Sidney Morning Herald* telah menjadi preseden buruk dalam hubungan bilateral Indonesia Australia yang diakibatkan oleh pers.

## 2. Artikel *After Marcos, Now Soeharto Billions*.

Artikel berjudul *After Marcos, Now Soeharto Billions* yang ditulis David Jenkins pada 10 April 1986 menjadi awal merenggangnya hubungan Indonesia dan Australia pada tahun 1986. Artikel tersebut merupakan

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Masduki. 2003. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Press. hlm 7-10

<sup>12</sup> Nunung Prajarto. Maret 1998. *Pers Negara Tetangga*. JSP Vol.1, No 3. hlm 90

<sup>13</sup> Ratih Hardjono. Op Cit. hlm 225

<sup>14</sup> *Ibid*. hlm 223

hasil investigasi penulisnya yang telah lama tinggal dan menetap di Indonesia selama 10 tahun.

Berdasarkan sumber yang dapat dijadikan pijakan untuk melihat latar belakang artikel David Jenkins sebagaimana dikemukakan Nur H.D. bahwa ia telah berada di Indonesia tahun 1977-1978, ketika Nur H.D masih kuliah di Bandung, sementara Arman Latif menjelaskan keberadaan David Jenkins di Indonesia erat kaitannya dengan tugasnya sebagai koresponden dari majalah Australia *Far Eastren Economic Review* di Jakarta pada tahun 1976-1980.<sup>15</sup>

Beberapa poin penting diuraikan dalam isi artikel *After Marcos, Now Soeharto Billions* yaitu: (1) Penyamaan rezim Ferdinand Marcos dengan rezim Soeharto; (2) Sumber kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Presiden Soeharto beserta rekan bisnisnya; (3) Cara yang digunakan Soeharto dan rekan bisnisnya untuk menumpuk kekayaan.

### 2.1 Paralelisme rezim Soeharto dan Ferdinand Marcos

Menurut David Jenkins, Soeharto dan Marcos memiliki perbedaan dalam kepemimpinan terutama penanganan masa resesi yang menimpa negaranya. Di Filipina, suasana yang ditimbulkan oleh masa resesi menjadi tidak menentu karena ekonomi menjadi semakin terpuruk. Berbeda dengan Filipina, Di Indonesia, masa resesi yang ditimbulkan oleh jatuhnya harga minyak telah ditangani dengan cara yang sangat berbeda.

Selain perbedaan kepemimpinan, David Jenkins juga menjelaskan tentang persamaan kepemimpinan Soeharto dan Marcos. Menurutnya, Ferdinand Marcos sewaktu masih menjadi presiden, istrinya diangkat menjadi gubernur Manila, anak-anaknya juga diangkat menjadi gubernur, begitu pula saudara perempuannya. Soeharto tidak mengangkat keluarganya menjadi gubernur di beberapa daerah tetapi menempatkan keluarganya pada jabatan-jabatan penting dalam perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan tertinggi di Indonesia.

Ny. Tien Soeharto juga disamakan dengan Imelda Marcos yang diberitakan memiliki 3.000 pasang sepatu dan menjadi gubernur Manila. Keterlibatan Ny. Tien Soeharto dalam kepemimpinan beberapa yayasan amal menjadi sorotan David Jenkins dalam artikel *After Marcos Now Soeharto Billions*

### 2.2 Akumulasi Kekayaan Soeharto dan Keluarganya

Nama Presiden Soeharto memang tidak nampak dalam setiap surat kepemilikan saham dan sertifikat tanah, namun nama-nama saudara laki-lakinya dan sebagian saudaranya, anaknya, putrinya, dan berbagai orang yang terkait dengannya juga rekan bisnisnya terdaftar pada setiap perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan paling tinggi di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan tersebut telah berkembang berkat hadiah berupa modal, kredit dan ijin dari pemerintah. Saat perusahaan-perusahaan tersebut pada suatu kondisi sedang mengalami kebangkrutan atau hampir bangkrut, mereka mendapat pertolongan dalam bentuk suntikan dana segar (bailout) dan pajak masyarakat Indonesia dari pemerintah.

David Jenkins secara berturut-turut juga menjelaskan tentang keterlibatan orang-orang terdekat Presiden Soeharto dalam berbagai urusan bisnis, antara lain:<sup>16</sup>

- Ny. Tien Soeharto diberitakan menjadi pemimpin pada beberapa yayasan amal. Secara teori yayasan amal tersebut menjadi lembaga non-profit milik swasta. Namun pada kenyataannya digunakan untuk menghindari pajak dan sebagai kendaraan untuk memperkaya diri mereka sendiri.
- Putra-putri Soeharto, Sigit dan Siti diberitakan telah mengakuisisi sepertiga bunga pada bank pribadi terbesar milik negara (sebuah institusi dengan aset mencapai US\$ 27 juta).
- Liem Sioe Liong (seorang pebisnis keturunan Indonesia-Cina), dikabarkan memiliki kerajaan bisnis dalam bidang penggilingan tepung dan pembuatan semen bernilai US\$ 2-3 Milyar.
- Saudara presiden, Probosutedjo, dikatakan telah berbagi dengan Liem Sioe Liong monopoli pemerintah dalam mengimpor cengkeh, lisensi virtual untuk mencetak uang pemerintah dimana cengkeh rokok seolah-olah merupakan kecanduan nasional.
- Sukamdani Gitosardjoono, dikatakan telah terlibat investasi bernilai US\$ 300 Juta pada bisnis pabrik semen dan memiliki kepentingan yang sangat besar di bisnis perhotelan, kayu, tekstil, penerbitan, dan distribusi pupuk.

Menurut David Jenkins, beberapa individu yang mempunyai kekayaan sangat besar dan begitu menakjubkan di negara yang memiliki pendapatan per kapita US\$ 500 pertahun tentunya sangat mengganggu masyarakat Indonesia, dan bahkan ada beberapa orang dengan berani secara terbuka mempertanyakan fakta tersebut. Presiden Soeharto telah sengaja membentuk sistem tersebut dan mengizinkan keluarganya untuk

<sup>15</sup> Majalah Tempo, 19 April 1986

<sup>16</sup> Surat Kabar Sydney Morning Herald. hlm 1

memperoleh keuntungan yang sangat besar, ini untuk mereka yang tidak memperhitungkan politik tetapi memberikan aib yang serius pada diri presiden.<sup>17</sup>

### 2.3 Sumber Kekayaan Keluarga dan Kerabat Soeharto

Setelah menguraikan secara panjang lebar kekayaan yang dimiliki keluarga dan kerabat presiden, pada kolom berikutnya David Jenkins mencoba untuk mengurai cara yang digunakan oleh keluarga dan kerabat presiden dalam membangun kekayaan mereka. David Jenkins memulai sambungan tulisannya dengan mengajukan pertanyaan “*Where did the Soeharto family wealth come from?*”

Menurut David Jenkins, sebagian besar kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Presiden Soeharto berasal dari hubungan bisnis dengan Liem Sioe Liong, seorang pebisnis berumur 69 tahun yang terkenal dikalangan pebisnis Cina sebagai “Liem Botak”. Liem juga dideskripsikan berbicara menggunakan Bahasa Indonesia dengan logat Cina.<sup>18</sup>

Liem adalah seorang “cukong” (Pemodal kaya dari Cina), dan “cukong-cukong” yang ke Indonesia merupakan kroni dari orang-orang Filipina di bawah kepemimpinan Ferdinand Marcos. Liem merupakan cukong yang luar biasa. Perkenalannya dengan Soeharto merupakan bagian terpenting dalam usaha bisnis keluarga Soeharto selama empat dekade kepemimpinan Presiden Soeharto.

Sama seperti Soeharto, Liem adalah seseorang dengan latar belakang yang sederhana. Ia datang di Kudus, Jawa Tengah, dari Cina Selatan sejak tahun 1938. Usianya baru 22 tahun ketika ia mulai bekerja dalam bisnis perdagangan kacang milik pamannya. Kemudian ia membuka cabang perdagangan cengkeh, menyuplai industri kretek (rokok yg tembakaunya dicampuri serbuk cacahan cengkeh) dalam jumlah besar di Kudus.

Liem mendapatkan peran penting selama masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Ia memasok keperluan perang seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan perlengkapan militer ke pasukan gerilyawan Indonesia, termasuk Soeharto.

Saat Soeharto naik menjadi presiden, peran dan pengaruh Liem di Indonesia juga ikut terangkat. Selama 20 tahun kepemimpinan Soeharto, Liem telah mengalahkan dan melampaui setiap pengusaha yang ada di Indonesia baik pengusaha Cina maupun pribumi.

Kesuksesan Liem dalam batasan tertentu berhasil dicapai berkat pengalaman dan bakat yang dimilikinya. Namun tidak dapat disangsikan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk konsesi juga menjadi alasan bagi kesuksesan Liem. Menurut David Jenkins bantuan itu hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa.

Selama satu tahun lebih Soeharto berada di puncak kekuasaan di Indonesia, Liem telah mendapatkan beberapa monopoli kunci dalam bisnis cengkeh dan tepung, baik dilakukan bersama-sama keluarga atau kerabat Soeharto. Ketika Liem mendirikan CV. Waringin (perusahaan perdagangan utamanya), pada waktu yang sama Sudwikatmono mengambil 25 persen saham perusahaannya.

Liem juga mampu mempunyai pengaruh dan kepentingan yang dominan dalam industri semen di Indonesia. PT. Indocement miliknya diberikan lokasi utama di Cibinong dan pabrik itu dibangun pada tahun 1975 oleh Soeharto. PT. Indocement memproduksi 8 juta ton semen pertahun dan telah mencukupi kebutuhan nasional yang mencapai 12,3 juta ton pertahun. Pada tahun 1981 angka penjualan produk PT. Indocement mencapai lebih dari US\$ 200 Juta.

Setelah masa resesi Pemerintahan Soeharto melakukan kesalahan ketika membeli 35 persen saham PT. Indocement saat permintaan semen mengalami penurunan. PT. Indocement mengalami kerugian dan memiliki banyak hutang. Pemerintah memerintahkan empat BUMN untuk memberikan pinjaman sekitar US\$ 120 Juta kepada PT. Indocement. Kebijakan itu menyebabkan nilai mata uang Rupiah menalami penurunan terhadap Dollar Amerika sampai 70 persen.

Kritikanpun berdatangan dari masyarakat Indonesia. Para kritikus menuduh pemerintah memberikan pinjaman kepada PT. Indocement bukan hanya karena Jakarta tidak mampu mempunyai sebuah perusahaan yang besar tetapi karena anggota keluarga Soeharto (setidaknya Ny. Tien Soeharto) memiliki kepentingan dalam perusahaan tersebut.

Liem juga mempunyai pengaruh dan kepentingan yang besar dalam bidang perbankan. Keluarganya memiliki 24 persen saham di BCA (Bank Central Asia), bank swasta terbesar di Indonesia. Pada tahun 1983, BCA memiliki aset US\$ 277 juta. Putra Presiden Soeharto, Sigit Harjojudanto, memiliki 16 persen saham dan Siti Hardijanti (putri Presiden Soeharto) juga mempunyai 16 persen saham BCA.

Pada tahun 1982 Liem juga memperluas bisnis perbankannya hingga ke luar negeri. Ia membentuk *The First Pacific Group* di Hong Kong dan membeli

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 7

*Hibernia Bancshares Corporation* (bank terbesar ke-12 di California).

Dalam masyarakat Indonesia muncul argumen yang mengatakan bahwa upaya Liem memperluas bisnisnya hingga keluar negeri adalah contoh tindakan kotor pencucian uang dan membawa lari modal nasional. Upaya menjadikan keluarga dan kerabat Presiden Soeharto sebagai mitra bisnisnya dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai cara jitu agar Liem selalu mendapat perlindungan dan bantuan dari presiden.

Probosutedjo (adik tiri Soeharto) menjawab dengan sederhana ketika ditanya seputar berita miring tentang sumber kekayaan keluarga presiden dan mengenai konsesi cengkeh. Menurut Probosutedjo, “Di luar kantor, Pak Harto sangat baik kepada keluarga dan kerabatnya tapi tidak pernah memberikan kesempatan dan kemudahan untuk memperkaya diri mereka sendiri.

Di sisi lain, ia dan kerabat lainnya tidak pernah diberi bantuan khusus, “kita harus mengakui bahwa keberhasilan kami adalah karena posisi Pak Harto, dalam bahasa Jawa disebut *kena sawabnya* (terkena keberuntungannya)”. Jika ada pejabat yang bersimpati kepada kami itu karena kami kebetulan adalah kerabat Pak Harto. Itu hanyalah nasib baik, bukan kami yang memintanya.<sup>19</sup>

Dalam akhir uraiannya pada artikel ini, David Jenkins menyimpulkan bahwa kerajaan bisnis bernilai miliaran dollar milik Liem dan keluarga Soeharto telah tumbuh subur dan membenarkan tentang nasib baik yang sederhana seperti halnya yang dikatakan oleh Probosutedjo tidak lagi menjadi penjelasan yang rasional.

### **3. Dampak Artikel *After Marcos, Now Soeharto Billions Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Australia 1986-1989***

Dampak yang ditimbulkan akibat tulisan David Jenkins ketika dihadapkan pada pimpinan dari 160 juta rakyat Indonesia yang merasa dirugikan nama baik pribadi maupun bangsanya berakibat pada memburuknya hubungan bilateral Indonesia-Australia. Ironisnya, kasus itu terjadi ketika hubungan bilateral kedua negara sedang menanjak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan makin seringnya kunjungan timbal balik pejabat pemerintah masing-masing.

Berikut ini akan dipaparkan beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia-Australia setelah munculnya artikel David Jenkins yang dimuat di surat kabar harian *The Sydney Morning Herald* pada 10 April 1986:

<sup>19</sup> *Ibid*

#### **3.1 Pembatalan Kunjungan Diplomatik**

Reaksi keras berdatangan dari pejabat tinggi Indonesia. Sesaat setelah kejadian tersebut Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie membatalkan kunjungannya yang dianggap sangat penting ke Australia. Menristek B.J. Habibie dijadwalkan tiba di Sydney pada 13 April 1986 untuk memulai tur empat hari di lembaga penelitian Australia dan membicarakan peningkatan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>20</sup>

Secara pribadi ia merasa kecewa, malu, dan dihina dengan artikel David Jenkins. Ia juga menegaskan, jika kunjungannya ke Australia akan dibatalkan hingga setahun yang akan datang.<sup>21</sup> Pembatalan mendadak kunjungan Menristek B.J. Habibie ke Australia juga merupakan perwujudan dari ketidaksenangan pemerintah Indonesia atas artikel yang dimuat di harian *Sydney Morning Herald*. Rencana kunjungan Gubernur Timtim, Maria Carrascalow ke Australia untuk membahas permasalahan “Timor Gap” yang akan dilangsungkan bulan April 1986 juga dibatalkan.

#### **3.2 Pelarangan Bebas Visa Bagi Wisatawan dan Wartawan Australia**

Ketegangan Indonesia-Australia terus memuncak akibat artikel David Jenkins, hal itu ditandai dengan dikeluarkan dan diberlakukannya kebijakan penolakan terhadap wartawan dan wisatawan asal Australia oleh Pemerintah Indonesia melalui dinas pariwisata.

Dampak kebijakan tersebut terjadi ketika sekitar 180 pelancong dari negeri kangguru itu ditolak masuk ke Bali pada 22 April 1986. Sekitar 78 wisatawan memutuskan untuk balik ke Australia, sedangkan sisanya meneruskan berwisata ke negara lain. Penolakan kunjungan wisatawan itu tidak diragukan lagi merupakan bagian dari rasa tidak senang pemerintah Indonesia yang telah menghina pribadi, keluarga teman dekat kepala negara.<sup>22</sup>

Kebijakan penolakan tersebut hanya berlaku selama satu hari. Bebas visa kembali diberikan kepada wisatawan Australia yang akan pergi ke Indonesia, namun bebas visa tetap tidak berlaku untuk wartawan asal Australia.

Ketegangan hubungan bilateral Indonesia-Australia bertambah rumit ketika dua wartawan Australia itu (Richard Palfreyman dan Jim Middleton) yang sebelumnya telah mendapatkan peringatan untuk

<sup>20</sup> Surat Kabar *The Age*. 14 april 1986. hlm 1

<sup>21</sup> Surat Kabar *Sinar Harapan*. 15 April 1986. hlm 1

<sup>22</sup> Phillip Kitley. Op Cit. hlm 299

tidak datang ke Indonesia tetap memberanikan diri hadir bersama rombongan pers Presiden Reagan.

Pemerintah Indonesia bertindak cepat terhadap kasus Richard Palfreyman dan Jim Middleton. Setibanya di Indonesia, keduanya diminta turun dari pesawat untuk kemudian dikawal ke dinas imigrasi. Selanjutnya, mereka diperintahkan meninggalkan Indonesia dengan menumpang pesawat DC-10 Garuda ke Tokio.<sup>23</sup>

### 3.3 Opini Masyarakat Australia Terhadap Soeharto dan Keluarganya

*Sydney Morning Herald* memprediksi bahwa mungkin ada reaksi Pemerintah Indonesia atas artikel *After Marcos, Now Soeharto Billion's* tetapi tidak menyangka jika dampaknya berakibat pada pelarangan akses media Australia terhadap Indonesia dan mungkin akan berdampak pula pada hubungan pertahanan kedua negara yang sesungguhnya bermanfaat bagi kedua negara. Sangat disayangkan jika korban pertama dari kebijakan tersebut adalah masyarakat Australia yang hendak pergi ke Bali.<sup>24</sup>

Opini masyarakat Australia pun berkembang seputar kebijakan pelarangan bebas visa bagi turis Australia yang ditentukan tanpa melalui musyawarah dewan tinggi Indonesia tetapi hanya berdasarkan instruksi pemerintah. Hal itu setidaknya membenarkan pernyataan David Jenkins dalam artikelnya yang menjelaskan bahwa presiden menjadi pusat kekuasaan dalam pemerintahan rezim Orde Baru. Orang-orang diberhentikan dari pekerjaannya, dipromosikan atau dipindahkan ke luar Jakarta hanya karena sikapnya yang tidak pro pemerintah.

Dampak yang ditimbulkan artikel *After Marcos, Now Soeharto Billions* tidak hanya melahirkan opini bagi masyarakat Australia, tetapi dampak yang ditimbulkan oleh artikel tersebut menjadi luas karena ikut dilansir oleh hampir semua kantor-kantor berita internasional dan surat kabar-surat kabar internasional baik yang terbit di Australia maupun Amerika seperti *The Age*, *The Washington Post*, dan *The New York Times*.<sup>25</sup>

Selanjutnya rangkaian tulisan tersebut diangkat sebagai laporan panjang dengan dibumbui politis oleh surat kabar lain di Australia, *Time* dan *News Week*, terakhir dimuat dalam harian Ekonomi Australia *Far*

*Eastren Economic Review* bahkan dalam terjemahan Indonesia telah disebarluaskan melalui penerbitan tidak resmi yang diedarkan melalui selebaran dalam bus kota di ibukota Jakarta. Dalam waktu singkat telah terbentuk opini masyarakat berskala dunia tentang Indonesia dengan kepala negaranya.

### 3.4 Reaksi Masyarakat Indonesia

Situasi dan kondisi dalam negeri juga tidak kalah hebohnya. Pada 15 April 1986, sekitar 200 pemuda Indonesia mendatangi Kedutaan Besar Australia di jalan Thamrin Jakarta untuk menuntut agar pers dan wartawan Australia yang melancarkan fitnah dan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia ditindak dengan keras.<sup>26</sup>

Para demonstran yang berada di luar gedung Kedutaan Besar Australia menaikkan spanduk-spanduk bertuliskan "Right or Wrong My Country", "Wartawan Australia Tidak Objektif", "Kita Mencintai Negara Tetangga tetapi Masih Mencintai Negeri Indonesia Sendiri".<sup>27</sup>

Artikel David Jenkins nampaknya telah menimbulkan "dilema" yang diakibatkan rumitnya dalam menyelesaikan melalui diplomasi. Sebab di satu sisi pemerintah Australia sebagaimana diungkapkan Menlu Gareth Evans bahwa pers Australia sering tidak mewakili suara pemerintah.<sup>28</sup>

Disisi lain Pers Australia yang menganut faham liberal kebebasannya tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah, dan pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk menyensor atau membredel pers seperti di Indonesia. Hal ini disebabkan terbitnya media massa di Australia tidak memerlukan ijin sehingga terbitnya sangat ditentukan oleh kemampuan para pengusaha dan pengelolanya.<sup>29</sup>

Pers Australia bebas dari segala bentuk pengawasan oleh pemerintah. Perdana Menteri Bob Hawke sendiri meskipun secara pribadi mengecam atas artikel David Jenkins tersebut, namun tegas ia mengaku tidak dapat berbuat apa-apa karena sistem yang berlaku dalam media massa Australia demikian. Lantas bagaimanakah upaya menyelesaikan kasus tersebut bagi kedua negara?<sup>30</sup>

## 4. Upaya Penyelesaian Kasus Artikel *After Marcos Now Soeharto Billions*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Surat Kabar *Sydney Morning Herald*. hlm 14

<sup>25</sup> Sumarno. 1997. *Pers Australia dan Pengaruhnya Dalam Hubungan Indonesia Australia (Kasus Tulisan Wartawan David Jenkins 1986)*. Tanpa Penerbit. hlm 14

<sup>26</sup> Surat Kabar Sinar Harapan. 15 April 1986. hlm 1

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Siboro. 1989. *Sejarah Australia*. Bandung: Tarsito hlm 176

<sup>29</sup> Phillips Kitley dkk. *Op Cit.* hlm 295

<sup>30</sup> Soemarno. *Op Cit.* hlm 19

Berbagai tanggapan daripada pejabat pemerintah setidaknya menjadi pertimbangan dalam meredakan ketegangan akibat artikel David Jenkins. Jendral Murdani mengatakan, pemberitaan harian Australia *Sydney Morning Herald* pada 10 April 1986 itu sungguh amat menyakitkan dan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Sementara Menteri Penerangan Harmoko menilai artikel David Jenkins dalam surat kabar *Sydney Morning Herald* tidak ubahnya sebagai jurnalisme alkohol dan tidak bertanggung jawab, karena ditulis dari lobi-lobi yang penuh kemabukan dan tidak berdasarkan kebenaran.<sup>31</sup>

Perbedaan tanggapan atas artikel David Jenkins ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Mochtar Kusuma Atmadja yang menilai bahwa reaksi dan sanksi yang dijatuhkan Indonesia dipandang sudah cukup keras. Ia mengingatkan agar Indonesia segera merebut kembali ketentuan penangguhan bebas visa bagi turis Australia. Alasannya sikap ini untuk mencegah memburuknya persoalan. Bahkan Mochtar Kusuma Atmadja menilai, tidak perlu menarik Dubes Indonesia untuk Australia yang saat itu dijabat oleh August Marpaung sehubungan dengan kasus David Jenkins.<sup>32</sup>

Pemerintah Indonesia dan Australia menyadari bahwa hubungan bilateal kedua negara tidak perlu dikorbankan akibat artikel David Jenkins. Penyelesaian kasus artikel *After Marcos, Now Soeharto Billions* diselesaikan dengan meningkatkan saling pengertian diantara kedua pemerintah.

Mengamati perkembangan yang terjadi pada tahun 1988 dan 1989 terlihat adanya usaha-usaha dalam meningkatkan saling pengertian antara pemerintah Indonesia dan Australia. Langkah-langkah yang ditempuh oleh kedua negara antara lain:

Kedatangan Rebecca Gilling<sup>33</sup> yang diadakan di Jakarta pada Januari 1987. Tidak dapat disangkal, kedatangan Rebbeca Gilling memang memikat jutaan penduduk Indonesia. Ia hadir pada saat hubungan Indonesia dan Australia berada pada titik yang tidak seakrab dulu. Terdapat ganjalan-ganjalan politik yang membuat pikiran di kedua negara penuh curiga dan saling sentimen. Masyarakat Indonesia terutama kalangan jurnalis percaya bahwa "Rebbeca menjadi

<sup>31</sup> Philip Kitley. *Op Cit.* hlm 286

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm 301

<sup>33</sup> Rebbeca Giling adalah pemeran "Stephanie Harper" dalam serial televisi *Return to Eden*. Rebbeca Gilling sebagai Stephanie, memang sedang berada pada puncak ketenarannya di kalangan pemirsas televisi Indonesia. Serial *Return To Eden* selalu ditunggu setiap Rabu malam.

alat cuci dosa pemerintahnya" dan kedatangannya membawa misi diplomatik.

Kunjungan Bill Hayden ke Jakarta, yang diadakan pada Februari 1988. Kunjungan itu bersifat tidak resmi sebagai Menteri Perdagangan merangkap Menteri Luar Negeri. Hayden mengungkapkan bahwa pemerintah dari partai manapun yang berkuasa di Australia tidak pernah mengabaikan pentingnya hubungan baik dengan Indonesia.

Hayden menambahkan bahwa hubungan kedua negara didasarkan kepentingan timbal balik untuk kesejahteraan umat manusia di kawasan ini. Pernyataan Hayden tersebut mendapat tanggapan yang positif dari pihak Indonesia. Menlu Indonesia Mochtar Kusuma Atmadja mengatakan "betapa kelirunya" anggapan yang mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan Australia dapat disebut tidak baik, dalam kenyataannya justru menunjukkan sebaliknya.<sup>34</sup>

Dalam suatu wawancara pada Maret 1988, Bob Hawke menegaskan bahwa Australia ingin sekali mempererat hubungan dengan Indonesia terutama di bidang ekonomi. Diharapkannya agar pemerintah Indonesia dapat membedakan pemerintah Australia dan media massa Australia.<sup>35</sup>

Akhir tahun 1988, Indonesia dan Australia sama-sama mendapatkan Menlu baru yang sama-sama berpandangan "internasional". Menlu Ali Alatas untuk Indonesia dan Menlu Gareth Evans untuk Australia. Kedua Menlu ini pertama kalinya bertemu di Jakarta akhir tahun 1988. Mereka sama-sama mencapai kesimpulan untuk mengadakan pendekatan baru dan mengembangkan hal-hal yang konkret dan jelas, sehingga antar kedua negara tidak perlu terlalu terpekau terhadap hal yang bersifat negatif seperti masalah pers. Hal ini mengingat hubungan antar kedua negara mencakup hal-hal yang jauh lebih luas.<sup>36</sup>

## KESIMPULAN

Indonesia dan Australia meskipun secara geografis merupakan bagian dari Asia Pasifik, namun memiliki perbedaan dalam cara memandang suatu peristiwa menyebabkan sifat ketetanggan dua negara tersebut menjadi kabur, sekaligus unik dan spesifik. Kekaburan ini menyebabkan hubungan kedua berfluktuasi naik turun tidak menentu dan digambarkan seperti berada di atas *roller coaster*.

Perbedaan itu terjadi karena kedua negara memiliki budaya politik yang berbeda. Australia secara

<sup>34</sup> Santoso. *Sejarah Australia*. Surabaya: University Press IKIP Surabaya hlm 85

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Surat Kabar Kompas, 30 Desember 1989

kultur-politik mewarisi budaya Barat (Eropa) yang mengedepankan kebebasan pers secara total. Artikel *After Marcos, Now Soeharto Billions's* yang ditulis David Jenkins merupakan cerminan kebudayaan Pers masyarakat Australia. Kebebasan Pers secara mutlak yang dianut oleh Australia memberikan peluang bagi individu untuk membuat berita-berita yang menguntungkan pihak tertentu meskipun ada pihak-pihak lain yang dirugikan.

Dampak yang ditimbulkan artikel *After Marcos, Now Soeharto Billions's* sangat luas. Diawali pembatalan kunjungan Menristek J. Habibie ke Australia, pencabutan visa bagi wisatawan dan wartawan Australia, pengekalan terhadap wartawan asal Australia baik yang bekerja di media massa lokal maupun internasional. Setelah kasus *After Marcos, Now Soeharto Billions's* tidak ada kunjungan diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ke Australia hingga tahun 1989.

Ternyata hanya dengan kearifan kedua negara retaknya hubungan bilateral kedua negara dapat dipulihkan kembali tanpa ada yang harus dirugikan. Indonesia dan Australia sepakat untuk memulihkan hubungan bilateralnya akibat tulisan David Jenkins hanya dapat ditempuh melalui meningkatkan pemahaman pentingnya sebuah persahabatan antara kedua negara.

## SARAN

Tidak menutup kemungkinan bahwa kasus tersebut akan terulang kembali dikemudian hari dengan format dan intensitas yang berbeda, namun apabila di dalam masyarakat kedua negara telah tertanam rasa pentingnya sebuah persahabatan seperti yang dikehendaki oleh pemimpin kedua negara maka setidaknya dapat dihindari kasus-kasus serupa.

Pemerintah, rakyat, dan media massa Australia demi keutuhan persahabatannya dengan Indonesia harus berani menerima kenyataan bahwa Indonesia kendati besar penduduknya, bukanlah ancaman bagi Australia dan harus pula bertekad untuk menghentikan sikap permusuhan dengan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Surat Kabar

- Surat Kabar Sydney Morning Herald, tanggal 10 April 1986. *After Marcos, Now Soeharto Billions*
- Surat Kabar Sydney Morning Herald tanggal 24 April 1986. *Snub over Soeharto cash Claim*
- Surat Kabar The Age, tanggal 14 April 1986. *Snub over Soeharto cash Claim*

- Surat Kabar The Age, tanggal 15 April 1986. *Indonesia to retaliate, ban media*
- Surat Kabar Angkatan Bersenjata, tanggal 29 Mei 1986. *F ABRI Kecam Tulisan Wartawan Australia*
- Surat Kabar Merdeka, tanggal 22 April 1986. *Indonesia-Australia Bahas Lagi "Timor Gap"*
- Surat Kabar Sinar Harapan, tanggal 15 April 1986. *Menteri Ristek & Gubernur Timtim Batalkan Kunjungan Ke Australia*
- Surat Kabar Sinar Harapan, tanggal 23 April 1986. *Wartawan Australia Tetap Tidak Akan Dapatkan Visa*
- Surat Kabar Sinar Harapan, tanggal 29 April 1986. *Menlu Harapkan AS Konsekuen Tidak Mengikutsertakann Wartawn Australia*
- Surat Kabar Sinar Harapan, tanggal 30 April 1986. *Kami Juga Bebas Untuk Tidak Menyukai Apa Yang Anda Tulis*
- Surat Kabar Suara Karya, tanggal 18 April 1986. *FKP Hargai Pernyataan PM Lee di Australia*
- Surat Kabar Suara Karya, tanggal 1 Mei 1986. *Mochtar: Pers Asing Bebas Menulis, Pemerintah Indonesia Bebas Menilai*
- Surat Kabar Kompas, tanggal 7 Desember 1988. *Menlu Evans Mengecam Pedas Pers Australia*
- Surat Kabar Kompas, tanggal 30 Desember 1989. *Memantau Hubungan RI dengan Australia*
- Majalah Tempo, tanggal 19 April 1986. *Cukup Australia, Cukup.*
- Majalah Tempo, tanggal 26 April 1986. *Soal Berita Koran Australia Itu.*
- Majalah Tempo, tanggal 3 Mei 1986. *Siapa Dilarang Masuk.*
- Majalah Tempo, tanggal 12 Juli 1986. *Wejangan Presiden dan Isu.*
- Majalah Tempo, tanggal 26 Juli 1986. *Ke Australia, tak Perlu Tergesa.*
- Majalah Tempo, tanggal 2 Mei 1987. *Timor Timur dari Sisi Hastings.*
- Majalah Tempo, tanggal 9 Mei 1987. *Mereka Menjaga Tindak Tanduknya.*

### 2. Buku

- Adil Hilman. 1993. *Hubungan Australia Dengan Indonesia 1945-1962*. Jakarta: Djambatan.
- Aminnudin Kasdi. 2001. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa Press.
- George Junus Aditjondro. 1998. *Dari Soeharto Ke Habibie (Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari: Kedua Puncak Korupsi, Kolusi, Nepotisme*

*Rezim Orde Baru*). Jakarta Pusat: Masyarakat Indonesia Untuk Kemanusiaan.

\_\_\_\_\_. 2006. *Korupsi Kepresidenan (Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa)*. Yogyakarta: LKIS

Greenwood, Gordon. 1969. *Australia: A Social And Political History*. Sydney: Halstead Press.

J.C.T. Simorangkir. 1986. *Pers SIUPP dan Wartawan*. Jakarta: Gunung Agung.

Jenkins, David. 2010. *Soeharto dan Barisan Jendral ORBA*. Jakarta: Komunitas Bambu

Jakob Oetama. 1987. *Perspektif Pers Indonesia*. Jakarta: LP3ES

K.J. Holsti. 1987. *Politik Internasional: Kerangka Analisa*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya

Kitley, Philips. Richard Chauvel & David Reeve. 1989. *Australia di Mata Indonesia – Kumpulan Artikel Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT. Gramedia

Masduki. 2003. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Press.

M.C. Rickleff. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.

Nurgoroho, Notosusanto. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

Ratih Hardjono. 1991. *Suku Putihnya Asia (Perjalanan Australia mencari Jati Dirinya)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Richard H. Chauvel. 1992. *Budaya dan Politik Australia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Saefur Rochmat. 2009. *Ilmu Sejarah Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Santoso. 1995. *Sejarah Australia*. Surabaya: University Press IKIP Surabaya

Siboro, J. 1989. *Sejarah Australia*. Bandung: Tarsito

Sumarsono Mestoko. 1988. *Indonesia dan Hubungan Antarbangsa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

### 3. Jurnal

Nunung Prajarto. Maret 1998. *Pers Negara Tetangga*. JSP. Vol. I, No 3

Sumarno. 1997. *Pers Australia Dan Pengaruhnya Dalam Hubungan Indonesia-Australia (Kasus Tulisan Wartawan David Jenkins 1986)*. Tanpa Penerbit.